

ISSN: 2598-7607
e-ISSN: 2622-223X

Vol. VII No. 2 September 2022



PUTIH

JURNAL

PENGETAHUAN TENTANG ILMU DAN HIKMAH

- **MENYOAL LANDASAN HUKUM KONSEP KAFAAH**
(Pembacaan Ulang Ayat-Ayat *Kafaah* Perspektif Wahbah al-Zuhayliy)
Ach. Mahbub, Muh. Fathoni Hasyim (1-28)
- **FIKIH-TASAWUF DALAM PANDANGAN ABDUL WAHHAB AL-SHA'RANI**
(Studi Analisis *Akhd al-Hukmi Ikhtiyat* dalam Kitab Mizan Al-Kubra)
Misbahul Hadi, Ainul Yaqin (29-46)
- **POLITIK SUFISME**
(Studi Kasus KH. Musta'in Romly dalam Partai GOLKAR)
M. Ubaidillah Hunaini (47-64)
- **RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ANALISIS USHUL FIKIH**
(Pola Kontrol Terhadap Kemaslahatan Sosial Antara Agam dan Negara)
A. Faiqil Faqih (65-80)
- **KORELASI TASAWUF AKHLAQI, IRFANI DAN FALSAFI**
(Antara Abdul Qadir al-Jilani, Rabi'ah al-'Adawiyah dan Ibn 'Arabi)
Achmad Miftachul Ulum (81-90)

diterbitkan :

MA'HAD ALY

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH

Surabaya

2022

Redaktur PUTIH
Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah

Ijin terbit

Sk. Mudir Ma'had Aly No. 18/May-PAF/II/2018/SK

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi
Husein Aziz
Mukhammad Zamzami
Chafid Wahyudi
Muhammad Kudhori
Abdul Mukti Bisri

Editor-in-Chief

Mochamad Abduloh

Managing Editors

Ainul Yaqin

Editorial Board

Imam Bashori
Fathur Rozi
Ahmad Syathori
Mustaqim
Nashiruddin
Fathul Harits
Abdul Hadi
Abdullah
Imam Nuddin

Alamat Penyunting dan Surat Menyurat:
Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya

P-ISSN: 2598-7607

ISSN: 2598-7607



E-ISSN: 2622-223X

e-ISSN: 2622-223X



Diterbitkan:

MA'HAD ALY
PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITTHRAH
Surabaya

Daftar Isi

- Daftar Isi
- **MENYOAL LANDASAN HUKUM KONSEP KAFAAH**
(Pembacaan Ulang Atas Ayat-Ayat *Kafaah* Perspekti Wahbah al-Zuhaylīy)
Ach. Mahbub, Muh. Fathoni Hasyim (1-28)
- **FIKIH-TASAWUF DALAM PANDANGAN ABDUL WAHHĀB AL-SHA‘RĀNĪ**
(Studi Analisis *Akhd al-Hukmi Ikhtiyāt* Dalam Kitab *Mīzān Al-Kubrā*)
Misbahul Hadi, Ainul Yaqin (29-46)
- **POLITIK SUFISME**
(Studi Kasus Afiliasi KH. Musta’in Romly dalam Partai Golkar)
M. Ubaidillah Hunaini (47-64)
- **RELASI AGAMA DAN NEGARA PERSPEKTIF ANALISIS USHUL FIKIH**
(Pola Kontrol Terhadap Kemashlahatan Sosial Antara Agama dan Negara)
A. Faiqil Faqih (65-80)
- **KORELASI TASAWUF AKHLAQI, IRFANI DAN FALSAFI**
(Antara Abdul Qadir al-Jilani, Rabi’ah al-‘Adawiyah dan Ibn ‘Arabi)
Achmad Miftachul Ulum (81-90)

POLITIK SUFISME
(Studi Kasus Afiliasi KH. Musta'in Romly dalam Partai Golkar)

M. Ubaidillah Hunaini

Ma'had Aly Al Fithrah, Surabaya

ubaidillahhunaini99@gmail.com

Abstract

Every personal of a Sufi has a high sensitivity and concern for others. To be able to fight for the religion of God, sometimes a Sufi must enter into things of a worldly nature. Not because of aim or impulses that are not good and because of the attraction or even love for things that are oriented to world, but because of the existence of goals that are unwittingly positive. That's the way was when a Sufi was affiliated to politics. This article aims to uncover what motives and contributions were made from Dr. KH. Musta'in Romly as an Nusantara Sufi who had been involved in politics, and even entered one of the political parties. At that time, the case became a bit of a conflagration and gained some opposition from some quarters. The research of this article results that there are many contributions that Kiai Musta'in produced when he entered politics, especially when he joined the Golkar party. This can be shown from the aspects that return to general public, especially NU residents and aspects that return to the big family of Darul Ulum Islamic Boarding School and TQN Rejoso.

Keywords: *kiai Musta'in, Contributions, politics and Golkar.*

Abstrak

Pribadi seorang sufi memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Untuk bisa memperjuangkan agama Allah, terkadang seorang sufi harus masuk dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan dengan adanya tujuan atau dorongan yang kurang baik dan karena adanya ketertarikan atau bahkan cinta pada hal-hal yang berorientasi pada dunia, namun karena adanya tujuan yang tanpa disadari bernilai positif. Hal itu sebagaimana di saat seorang sufi berafiliasi pada dunia politik. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap motif dan kontribusi apa yang dihasilkan daripada Dr. KH. Musta'in Romly sebagai seorang sufi Nusantara yang pernah terjun dalam dunia politik, dan bahkan masuk dalam salah satu partai politik. Pada waktu itu, kasus ini menjadi sedikit kontroversi dan mendapatkan beberapa tanggapan dari beberapa kalangan. Penelitian dari artikel ini menghasilkan bahwa ada banyak kontribusi yang dihasilkan kiai Musta'in saat ia menerjuni dunia politik, terutama di saat bergabung dengan partai Golkar. Hal itu dapat diperlihatkan dari aspek yang kembali pada masyarakat umum terutama warga NU dan aspek yang kembali pada keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Dan TQN Rejoso.

Kata Kunci: *kiai Musta'in, kontribusi, politik, Golkar.*

Pendahuluan

Di tengah arus modernitas dan globalisasi ini, sebagaimana penjelasan Abu Manshur yang dinuqil oleh al-Qusyairi dalam kitabnya “*al-Risālah al-Qusyairiyah*” yang menyatakan bahwa sufi ialah seorang yang dikirimkan oleh Allah untuk memberikan peringatan dan nasehat kepada makhluk¹.

Pribadi seorang sufi memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama, untuk bisa memperjuangkan agama Allah terkadang seorang sufi harus masuk dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan dengan adanya tujuan atau dorongan yang kurang baik dan karena adanya ketertarikan atau bahkan cinta pada hal-hal yang berorientasi pada dunia, namun karena adanya tujuan baik, yaitu untuk memperjuangkan agama Allah swt.

Banyak dijumpai fenomena seorang sufi yang berkontribusi dalam hal-hal yang dalam pandangan umum berorientasi pada dunia. Namun pastinya ia memiliki dorongan lain yang orientasinya ialah karena Allah swt, khususnya pada dunia politik. Di antara beberapa ulama sufi yang berkontribusi dalam dunia politik atau masuk pada sebuah partai politik ialah KH. Muhammad Shiddiq.

Tokoh ini merupakan seorang kiai yang hidup di kabupaten Kudus, Tepatnya di desa Piji, kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Ialah sosok kiai yang hidup pada masa orde lama sampai orde baru. Selain menjadi pengasuh pondok pesantren (Manba’ul Falah Piji Kudus), ia juga merupakan seorang mursyid tarekat *Qadiriyah wa Naqsyabandiyah* yang berada di Piji Kudus.²

Sebagaimana umumnya para Kiai yang berada di kabupaten Kudus yang pada era orde baru kebanyakan bergabung dalam partai Persatuan Pembangunan, yang mana partai tersebut ialah partai yang berbasis Islam dan menjadi partai yang menampung kebanyakan kalangan umat Islam dan para kiaiinya. Namun, kiai Muhammad Shiddiq memilih jalan yang berbeda dengan umumnya kiai lain. Ia memilih untuk bergabung di partai yang berbasis nasionalis, yaitu partai Golkar. Bahkan sempat menjadi anggota legislatif (DPRD) kabupaten Kudus dari Golkar selama dua periode.³

Dengan kecenderungan masyarakat kabupaten Kudus yang biasanya akan memandang turun kharismatik seorang kiai dan bahkan akan mencemoohnya ketika telah bergabung dalam partai nasionalis, namun berbeda dengan hal yang terjadi pada kiai Muhammad Shiddiq. Adanya keterlibatan kiai Muhammad Shiddiq secara aktif dalam partai Golkar, tidak menurunkan kharismatiknya sebagai seorang mursyid tarekat di mata masyarakat, dan bahkan jumlah santri di pondok pesantrennya semakin bertambah.⁴

Maka, adanya fenomena seorang sufi masuk dalam dunia politik, bukanlah merupakan hal yang aneh. dikarenakan umat Islam yang tersebar di nusantara ini, atau bahkan di berbagai penjuru dunia, tersebar sangat luas dalam berbagai kalangan, dan sebagian ada yang berada dalam kalangan politik. Jadi sangat wajar jika ada seorang sufi yang terjun dalam dunia politik dengan tujuan untuk menjaga dan menyalamatkan umat Islam yang berada dalam kalangan politik.

¹ Al-Qusyairi Abu al-Qasim Abd al-Karim bin Hawazin, *al-Risālah al-Qusyairiyah* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2011), 332.

² Ma'mun Mu'min, “PERGUMULAN TAREKAT DAN POLITIK (Perranan Kiai Haji Muhammad Shidiq dalam Terekat dan Politik di Kudus)”, STIN Kudus, dalam *media.neliti.com*, (29 Februari 2020), 3-4.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

M. Ubaidillah Hunaini

Dengan adanya hati seorang sufi yang bersih dan tidak ada sedikitpun keterpautan pada gemerlap dan mewahnya dunia, sebagaimana diterangkan diatas, sangatlah tidak mungkin jika dengan bergabung dan terjun dalam politik akan membuat hati seorang sufi goyah dan menghalangi kedekatannya kepada Tuhan.

Selain tokoh yang telah disebutkan, terdapat seorang sufi lain yang juga terjun dalam dunia politik dan masuk dalam salah satu partai politik, yang pada waktu itu menjadi sedikit kontroversi dan mendapatkan beberapa tentangan dari beberapa kalangan. yaitu, Dr. KH. Musta'in Romly.⁵

Kiai Musta'in ialah pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang yang juga menjadi rektor UNDAJ Jombang. ia juga merupakan mursyid jama'ah tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* yang berpusat di Rejoso. Di tengah kesibukannya yang begitu padat, pada sekitar tahun 1970, ia memilih untuk bergabung dalam salah satu parpol, yaitu partai Golkar, dengan menjadi salah satu juru kampanye Golkar di Jawa Timur.

Partai Golkar (golongan karya) ialah salah satu dari tiga partai yang sah pada masa itu (orde baru), yaitu partai Golkar, PDI dan partai PPP. Partai Golkar ialah partai yang berkuasa pada masa itu, yang berada dibawah kepemimpinan Soeharto yang oleh kebanyakan masyarakat dinilai tidak simpatik pada kalangan muslim. Sedangkan kebanyakan warga muslim khususnya penganut *jam'iyah NU (Nahdatul Ulama)* berafiliasi dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Seluruh parpol Islam berkumpul dan berafiliasi dalam partai tersebut. Sehingga ketika kiai Musta'in memutuskan untuk bergabung pada partai Golkar banyak dari kalangan umat muslim yang mencaci maki bahkan menentangnya.⁶

Lebih parahnya lagi, murid-murid tarekat kiai Musta'in juga mendapatkan dampak dari keputusan yang diambil olehnya tersebut. Terjadi pecah belah di antara para murid tarekat Kiai Musta'in lantaran ia dianggap telah melakukan kemurtadan politik. Bahkan sampai terdapat beberapa murid yang berpindah guru (mursyid) kepada mursyid lain dan meninggalkan kiai Musta'in. bahkan sampai saat ini terdapat beberapa orang yang beranggapan bahwa ke-*mursyid*-an kiai Musta'in dalam tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* tidak sah.⁷

Berangkat dari latar belakang ini. penulis ingin menggali dan mengungkap apa sebenarnya motif kiai Musta'in Romly masuk ke dalam partai Golkar, dan kontribusi apa yang dihasilkan dari keputusan yang kontroversial ini.

Antara Tasawuf dan Politik: Gerakan Seorang Sufi dalam Berpolitik

Melihat adanya beberapa tokoh sufi yang pernah berafiliasi dalam berpolitik, perlu dijabarkan antara tasawuf dan politik itu sendiri secara definisi sebagai titik temu dalam menilai seorang sufi yang sufi yang berpolitik tersebut. Mengenai pengertian tasawuf, banyak sekali para ulama sufi (ahli tasawuf) mendefinisikannya dengan devinisi yang berbeda antara satu dengan lainnya, sesuai dengan

⁵ Ust Wahdi Alawi, *wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2020 M, (Ust Wahdi Alawi ialah salah satu Ustadz/pengajar senior di PonPes As-Salafi al-Fithrah Surabaya, pusat tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah al-Utsmaniyyah*)

⁶ Ust Nashiruddin S, Pd M,M, *wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2020 M, (Ust Nasiruddin ialah ialah salah satu Ustadz/pengajar di PonPes As-Salafi al-Fithrah Surabaya, pusat tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah al-Utsmaniyyah*, yang merupaka alumni PonPes Darul Ulum Jombang yang belajar disana pada masa masih hidupnya Kiai Musta'in Romly).

⁷ Ust Wahdi Alawi S, Ag, *wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2020 M.

M. Ubaidillah Hunaini

pengalaman masing-masing sufi itu sendiri. Bahkan dikatakan, jumlah definisi para sufi terhadap tasawuf mencapai dua ribu definisi, yang semuanya mengalir pada satu muara makna yang sama, yaitu *shidq al-tawajjuh* (kesungguhan dalam menghadap).⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Abu Nu'aim yang dikutip Syaikh Ahmad Asrori al-Ishaqy dalam kitabnya "*al-Muntakhabāt*" yang menyatakan bahwa setiap orang yang dalam dirinya terdapat bagian dari *shidq al-tawajjuh*, berarti terdapat pula bagian dari tasawuf dalam dirinya.⁹

Syaikh Junaid al-Baghdadi mengatakan, tasawuf ialah jernih atau bersihnya segala perbuatan dan tindakan. Juga ada yang mengatakan bahwa tasawuf ialah membersihkan hati dari ikut atau condong terhadap makhluk, menghindari kegelisahan hati yang berorientasi terhadap hawa nafsu, selalu bersandar pada ilmu-ilmu hakekat dan ikut terhadap syari'at Rasulullah saw.¹⁰ Syaikh Junaid al-Baghdadi dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa, tasawuf ialah mengamalkan setiap akhlaq yang tinggi (mulya) dan meninggalkan setiap akhlaq yang rendah (jelek).¹¹ Sebagian ulama' juga mengatakan bahwa keseluruhan dari tasawuf ialah akhlak, maka barang siapa yang semakin bertambah akhlaknya maka semakin bertambah pula ketasawufannya.¹²

Menurut Syaikh Abdul Qadir 'isa, terlepas dari berbeda-bedanya pendapat mengenai pengertian tasawuf, dengan berlandaskan pada hakikat-hakikat dan dasar-dasar tasawuf, menarik kesimpulan bahwa tasawuf ialah memebersihkan dan mensucikan jiwa, menjernihkan hati, memperbaiki akhlak dan sampainya pada tingkatan *ihsān*.¹³

Jika berbicara mengenai ilmu tasawuf, tentunya pemahaman masih mentah jika tidak dilanjut mengenai pengertian atau penjelasan sufi, sebagai orang yang telah mengamalkan dan menjiwai ilmu-ilmu yang telah diajarkan dalam tasawuf. Syaikh Abu Bakar as-Syibli menjelaskan bahwa sufi ialah seorang yang hatinya bersih dan selalu terus menerus berusaha membersihkan hatinya, dan menempuh jalan yang telah dituntunkan Rasulullah saw, sama sekali tidak peduli bahkan tertarik pada dunia dan senantiasa tidak menghiraukan keinginan hawa nafsunya.¹⁴

Sebagian ulama sufi lain mengatakan, bisa dinamakan sufi, ialah ketika seorang hamba telah menyatakan atau membuktikan sifat kehambaannya kepada Allah swt, dan Allah menjernihkan hatinya dari kotornya sifat manusiawi, sehingga ia bisa menduduki beberapa tingkatan hakekat dengan tetap melaksanakan semua hukum-hukum syari'at. Ketika seseorang telah melaksanakan semua itu, maka ia bisa dikategorikan sebagai sufi.¹⁵

Lalu, politik sendiri berasal dari bahasa Yunani *Politeia*, yang asal bahasanya ialah *polis*, yang artinya ialah kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan kata *teia* yang artinya urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik berarti kepentingan umum warganegara suatu bangsa. Politik

⁸ Ahmad Zaruq al-Fasi, *Qawā'id al-Taṣawwuf*, (Surabaya: STAI Al-Fihrah, 2017), 9.

⁹ Ahmad Asrori, *al-Muntakhabāt*, (Surabaya: Alkhidmah, 2009), 128.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Qadir 'isa. *Haqā'iq 'an al-Taṣawwuf*, (Suriyah: Dar al-'irfan, 2007), 17

¹² *Ibid.*, 18.

¹³ Abdul Qadir 'isa. *Haqā'iq 'an al-Taṣawwuf*, 21.

¹⁴ *Al-Tasyarruf bi Dzīkri Ahli al-Taṣawwuf*, 12-13.

¹⁵ Al-Thusi Abu Nashr al-Sarroj, *Al-Luma' fī al-Taṣawwuf*, 47.

M. Ubaidillah Hunaini

merupakan serangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki oleh suatu kesatuan masyarakat atau bangsa.¹⁶

Secara umum, politik ialah meliputi proses untuk menentukan beberapa tujuan suatu negara sekaligus cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, memerlukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan, pembagian atau alokasi sumber-sumber yang ada, yang kemudian untuk melaksanakan proses-proses tersebut diperlukan adanya kekuasaan dan wewenang (*authority*) yang berguna untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹⁷

Jadi, dengan demikian, politik membahas beberapa hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (*policy*) dan distribusi atau alokasi sumber daya.¹⁸

Miriam Budiardjo mengatakan, secara umum politik ialah beberapa macam kegiatan yang terdapat dalam suatu sistem politik (negara) yang berhubungan dengan proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik tersebut, dan bagaimana cara untuk mewujudkan beberapa tujuan tadi. Kemudian mengenai cara untuk menentukan apa yang akan dijadikan sebagai tujuan-tujuan dari suatu sistem politik, ialah dengan cara menyeleksi terhadap beberapa alternatif dan menyusun skala prioritas terhadap beberapa rancangan tujuan yang telah dipilih.¹⁹

Politik merupakan aktifitas interaksi individu-individu dalam suatu kelompok yang berusaha mengelola hubungannya agar timbul sebuah kebaikan masyarakat dalam suatu wilayah negara maupun pemerintahan melalui sebuah peraturan dan keputusan yang sifatnya mengikat secara kolektif (bersama).²⁰

Dengan adanya fenomena tokoh sufi (ahli tasawuf) yang masuk dan terjun dalam gerakan sosial politik, maka hal ini tidak dapat dianggap salah, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam tasawuf. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena beberapa tokoh sufi yang masuk dan bergabung dalam gerakan politik, yang tentunya bukan tanpa adanya tujuan yang berorientasi pada nilai-nilai tasawuf.

Selain alasan diatas, jika ditinjau dari pengertian ilmu politik sendiri secara murni, tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam tasawuf.

Sesuai dengan beberapa penjelasan tentang ilmu politik, maka, jika praktek pengamalan politik dilakukan dengan murni, tanpa adanya beberapa dorongan yang berorientasi pada kepentingan dan kesenangan pribadi, tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam tasawuf. Bahkan, dalam prespektif politik Islam.

Dinyatakan bahwa Islam tidak memisahkan agama dengan politik dan politik pun memerlukan legitimasi agama.²¹ Jadi, ketika seorang tokoh sufi memadukan antara gerakan tasawuf

¹⁶ Indonesia Civics Education, *Pendidikan Kewarganegaraan*, diambil dari Books.google.co.id pada 13 Mei 2020, 137.

¹⁷*Ibid*, 137-138.

¹⁸*Ibid*, 138.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 8.

²⁰ Dzul Fadli. Andi Muh., *Sistem Politik Indonesia*, diambil dari books.google.co.id pada 13 Mei 2020, 6.

²¹ Syakur Abdul, *Transformasi Gerakan Tarekat Syafawiyah dari Teologis ke Politis*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2014), vol.8, 188

M. Ubaidillah Hunaini

atau tarekatnya dengan sosial politik, dibalik gerakan itu pasti ada kontribusi yang saling menguntungkan antara dua unsur tersebut.

Adanya politik yang secara murni sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran tasawuf. Hal ini dari dulu telah banyak dibuktikan dan diamalkan oleh beberapa tokoh-tokoh dari ulama tasawuf. Salah satunya ialah KH. Muhamad Shiddiq.

KH. Muhammad Shiddiq ialah seorang kiai yang hidup di kabupaten Kudus, tepatnya di desa Piji, kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. ia merupakan sosok kiai yang hidup pada masa orde lama sampai orde baru. Selain menjadi pengasuh pondok pesantren (Manba'ul Falah Piji Kudus), ia juga merupakan seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang berada di Piji Kudus.

Sebagaimana umumnya para kiai yang berada di kabupaten Kudus yang pada era orde baru kebanyakan bergabung dalam partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang mana partai tersebut ialah partai yang berbasis Islam dan menjadi partai yang menampung kebanyakan kalangan umat Islam, khususnya warga NU dan para kiainya. Namun, kiai Muhammad Shiddiq memilih jalan yang berbeda dengan umumnya kiai lain. Ia memilih untuk bergabung di partai yang berbasis nasionalis, yaitu partai Golkar. Bahkan sempat menjadi anggota legislatif (DPRD) kabupaten Kudus dari Golkar selama dua periode.

Dengan kecenderungan masyarakat kabupaten Kudus yang biasanya akan memandang turun kharismatik seorang kiai dan bahkan akan mencemoohnya, ketika telah bergabung dalam partai nasionalis, namun berbeda dengan hal yang terjadi pada kiai Muhammad Shiddiq. Adanya keterlibatan kiai Muhammad Shiddiq secara aktif dalam partai Golkar, tidak menurunkan kharismatiknya sebagai seorang mursyid tarekat bertambah.

Riwayat Hidup KH. Musta'in Romly dan Sosio-Politik di Masanya

Nama lengkap dan gelar kiai Mustain ialah DR. KH. Musta'in Romly. Ia lahir di Jombang 31 Agustus 1931 M, tepatnya di Desa Rejoso Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Jawa Timur. ia merupakan putra ke dua dari pasangan kiai Romli Tamim dengan nyai Siti Maisarah, kemudian ia wafat pada usianya yang sekitar ke 54 tahun, di Jombang yang bertepatan pada hari Selasa tanggal 1 Jumadil Awal 1406 H (21 Januari 1985 M).²²

Sejak kecil kiai Musta'in mendapatkan pendidikan langsung dari orang taunya, KH. Romli Tamim di Pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang. Kemudian ia juga mengenyam beberapa pendidikan formal yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (1943 M), Madrasah Tsanawiyah (1946 M), kemudian Madrasah Aliyah (1949 M). Setelah ia lulus dari Madrasah Aliyah, yaitu pada tahun 1949, kemudian melanjutkan pendidikan Akademi Dakwah al-Muballighin, yang berada di Semarang dan lulus pada tahun 1954 M.²³

Kiai Musta'in memiliki bakat kepemimpinan yang menonjol. Bakat yang dimilikinya ini sudah mulai tampak sejak ia belajar di Akademi Dakwah al-Muballighin, Semarang. Hal ini terbukti ketika ia berhasil mengumpulkan sahabat-sahabat kuliahnya yang juga berasal dari Jombang dan mengajak

²² Muhtadi, *Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan Generasi Muda Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiah Universitas Darul Ulum (IQN UNDAAR) Jombang*, (Surabaya: UINSA, 2019),96.

²³*Ibid*, 101

M. Ubaidillah Hunaini

mereka untuk memebentuk persatuan mahasiswa Jombang yang terbentuk pada akhir tahun 1954 M.²⁴

Selain mengenyam beberapa pendidikan formal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, kiai Musta'in juga mendapatkan pendidikan tentang ajaran tarekat dari orang tuanya, KH. Romli Tamim. Ia juga mendapat pendidikan pesantren dan pendidikan sosial masyarakat dan politik. Hal ini terbukti dengan menjabatnya sebagai pengurus Ikatan Pelajar Nahdhatul 'Ulama (IPNU) pada pereode tahun 1954-1956 M, pengurus Gerakan Pemuda Anshor NU dan pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU.²⁵

Pada bidang politik, kiai Musta'in juga memiliki prestasi yang gemilang. Ia mulai bergabung pada partai Golkar pada tahun 1975 dan mulai ikut kampanye pada pemilu tahun 1977. Kiai Musta'in juga termasuk pendiri dan pengurus pusat Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Golkar lalu kemudian terpilih sebagai anggota DPR/MPR RI selama dua periode sampai akhirnya beliau wafat pada 21 Januari 1985 M, dan masih berstatus sebagai anggota DPR/MPR RI.²⁶

Walaupun sebagai seorang politikus yang tergabung pada partai nasionalis yang pada masanya memiliki kekuatan yang sangat kuat dan bahkan paling berkuasa di Indonesia, ia tetap konsiten pada sifat-sifat mulia yang sesuai dengan adanya beliau sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Ulum sekaligus sebagai seorang mursyid tarekat *Qadiriyah wa Naqsyabandiyah* meneruskan ayahnya, KH. Romly Tamim. Dan juga sebagai seorang rektor Universita Darul Ulum.

Kiai Musta'in memiliki kepribadian yang sabar dan pemaaf. Hal ini terbukti ketika ia menghadapi tentangan, tuduhan dan hujatan pedas dari berbagai kalangan setelah beliau memutuskan untuk masuk dan berafiliasi dalam partai yang berlambang pohon beringin (Golkar). Baik yang berasal dari keluarga, lawan politiknya, terutama para kiai yang berada dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maupun masyarakat. Ia menghadapi itu semua dengan sabar.

Tindakan yang dipilih kiai musta'in untuk masuk dalam partai Golkar merupakan suatu keputusan yang kontroversial, yang sangat menggemparkan masyarakat, khususnya kaum *Nahdīyīn* (warga NU), bahkan sampai terdapat beberapa kiai senior yang sebelumnya sering mendampingi kiai Musta'in dalam setiap kegiatan tarekat, memilih untuk *mufarraqah* dan berpindah pada mursyid lain.²⁷

Diceritakan, pada akhir-akhir masa hidupnya, ia berkata, bahwa ia telah memaafkan semua orang yang pada waktu awal-awal ia masuk Golkar menghina, mnecemooh, menentang dan lain sebagainya. Baik orang-orang tersebut meminta maaf maupun tidak. Diceritakan bahwa terdapat salah seorang murid tarekat kiai Musta'in yang berasal dari Sidoarjo, ber-*mufarraqah* ketika mengetahui kiai Musta'in bergabung pada partai Golkar dan tidak mengamalkan lagi amalan-amalan tarekat yang biasa diamalkannya. Kemudian bertahun-tahun kemudian, setelah sepeninggalan kiai Musta'in, ia bermimpi bertemu kiai Musta'in. Dalam mimpi tersebut kiai Musta'in sedang mengabsen santri-santrinya, lalu saatiba pada gilirannya, santri yang bernama Hudhori yang telah lama ber-*mufarraqah* tadi, dipanggil namanya oleh kiai Musta'in seraya mengatakan "*ri.. jenengmu sek onok nek kene*" (hudhori, namamu masih ada disini). Mimpi tersebut berarti bahwa kiai Musta'in masih

²⁴*Ibid*, 101-102.

²⁵*Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

²⁷*Ibid*, 104

M. Ubaidillah Hunaini

menganggap murid yang telah lama meninggalkannya tadi, sebagai Muridnya. Setelah itu murid tersebut merasa menyesal dan kembali mengamalkan semua amalan-amalan tarekat yang telah dibimbingkan oleh kiai Musta'in.²⁸

Kiai musta'in memiliki cita-cita dan tekad yang sangat tinggi dan kuat. Suatu ketika ia pernah berkata "saya tidak rela jika pemerintahan ini hanya dipimpin oleh orang-orang Islam abangan". Dari prinsip dan keinginan inilah akhirnya ia mendirikan perguruan tinggi Universitas Darul 'Ulum Jombang pada tahun 1956, dan perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi swasta yang pertama kali didirikan di Jombang. Hal ini bertujuan untuk membuat sarana atau wadah untuk mencetak generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang yang sesuai dengan slogannya "mencetak generasi yang berotak London dan berhati Masjidil Haram", yang bertujuan supaya negara ini tidak hanya dikuasai oleh orang-orang Islam abangan dan supaya kaum muslim khususnya kaum *Nabđiyyīn* bisa ikut menyampaikan aspirasi mereka.²⁹

Sebagai seorang kiai, pengasuh pondok pesantren dan seorang mursyid tarekat *Qadiriyah wa Naqsyabandiyah*, yang mana sebagaimana telah diketahui, ia telah memberikan pengaruh dan perkembangan yang sangat pesat pada pondok pesantren Darul Ulum, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mendirikan beberapa lembaga sekolah umum mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan juga merupakan seorang politikus hebat. Namun tidak banyak karya yang berupa tulisan, baik buku maupun jurnal yang telah tertulis atau terbukukan dan bisa dilihat sampai sekarang darinya. Hanya terdapat satu karya tulis yang dapat dijumpai sampai saat ini. Yaitu, kitab *Risālah al-Khawāṣṣiyah*, yang merupakan syarah atau penjabaran dari kitab karangan ayahnya sendiri, KH Romly Tamim, yaitu kitab *al-Istigāṣah bi Ḥaḍrāti Rabb al-Barīyah*.³⁰

Selain karya intelektual, baik yang telah tertulis maupun belum, kiai musta'in juga memiliki beberapa karya sosial yang bahkan jumlahnya lebih banyak daripada karya yang bersifat intelektual diatas. Diantaranya ialah sebagai berikut³¹:

1. Organisasi Tarekat Muktabarah. Kiai Musta'in ialah orang pertama kali membentuk organisasi tersebut, yang kemudian terpilih sebagai ketua pada muktamar tarekat di Madiun tahun 1975 M.
2. Mendirikan lembaga pendidikan formal di pondok pesantren Rejoso, yang mana semula hanya terdapat pendidikan tradisional (khusus ngaji kitab kuning) saja.
3. Menjadi anggota DPR/MPR RI pada tahun 1982-1985
4. Mendirikan APTAISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Indonesia).
5. Menjadi anggota ASRI (Asosiasi Rektor Indonesia)
6. Menjadi anggota IAUP (*International Association Of Univercity Presiden's*) pada tahun 1981 di Costarika.

²⁸ Dr. H. Muhtadi (salah satu dosen UN DAR, yang dulunya merupakan santri kiai Musta'in dan juga saksi hidup kiai Musta'in), *Wawancara*, Jombang, 20 April 2020.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, 107-108

³¹ *Ibid.*

M. Ubaidillah Hunaini

7. Menjadi wakil ketua DPP Guppi (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) pada tahun 1984-1985.

Fokus terhadap fenomena di mana kiai Musta'in memutuskan untuk masuk pada partai Golkar, kemungkinan besar kiai musta'in memilih untuk mengambil tindakan ini, ialah dikarenakan kondisi politik yang sedang terjadi pada masa itu. Kiai Musta'in masuk Golkar ialah bertepatan pada tahun 1975, yang mana tahun tersebut terdapat dalam era pemerintahan rezim orde baru (1966-1980) yang dipimpin oleh presiden Soeharto. Oleh karena itu perlu dicantumkan pembahasan mengenai bagaimana kondisi politik pada masa itu, dikarenakan hal itulah yang menjadi alasan besar mengapa kiai Musta'in yang merupakan salah satu dari kaum nahdhiyin dan bahkan masih keluarga dari pendiri NU itu sendiri, malah memilih untuk bergabung dalam partai Golkar. Padahal pada umumnya orang-orang kaum nahdhiyin berkumpul dalam partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Masa orde baru ialah pada tahun 1966-1980. Pemerintahan orde baru ini mulai berdiri setelah runtuhnya masa pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno, yang berakhir pada tahun 1965. Gerakan pemerintahan orde baru ini dipimpin oleh jenderal Soeharto. Langkah awalnya ialah melalui sidang umum MPRS tahun 1967 yang mana pada sidang tersebut, MPRS mengangkat jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden untuk sementara menggantikan presiden Soekarno. Kemudian ketetapan MPRS no XI tahun 1966 yang mengamanatkan supaya pemilu bisa diselenggarakan pada tahun 1968, oleh Soeharto dirubah dengan menetapkan, pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Namun, pada tahun 1968 Soeharto malah secara resmi diangkat menjadi presiden oleh MPRS.³²

Pemerintahan orde baru kemudian merubah segala sistem kenegaraan jauh berbeda dengan sistem yang telah dibentuk oleh pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh presiden Soekarno. Langkah awal yang diambil oleh pemerintahan orde baru ialah dengan menggandeng ABRI, khususnya angkatan darat dan memberikannya peran politik yang cukup besar yang kemudian teknisnya ialah, hubungan antara sipil dengan ABRI harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, supaya dapat menciptakan dan menjaga keseimbangan dan ketetapan yang sesuai dengan kebutuhan.³³

Dibawah komando ABRI, pemerintahan orde baru berhasil menunjukkan pada dunia bahwa pembangunan nasional Indonesia telah berhasil, sehingga dapat menarik negara-negara donor untuk berinvestasi. Keberhasilan dalam kemajuan ekonomi ini, berhasil untuk memperkuat keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan yang berlangsung.³⁴

Namun, dibalik kemajuan dan berkembangnya ekonomi ini, menimbulkan dampak dengan semakin ketatnya hak-hak politik sipil, yang akhirnya hal ini menjadikan Golkar menjadi semakin kuat, dikarenakan menurunnya minat dan keinginan dari organisasi sipil yang sebenarnya telah cukup terorganisir untuk berdiri menjadi lawan politik Golkar, sehingga menjadi semakin banyak rakyat yang bergabung dan memberikan dukungannya terhadap partai Golkar. Bukan hanya sampai disitu

³² Wahyono Hadi Dwi dan Gayung kusuma, Propaganda Orde Baru 1966-1980, dalam *www.journal.ac.id*, (5 Mei 2020), 1-2.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

M. Ubaidillah Hunaini

saja, bahkan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan adanya ketimpangan sosial, ketidakadilan dan ketiadaan jaminan keamanan sosial maupun budaya dari berbagai macam kecurangan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.³⁵

Selain menggunakan ABRI dan Golkar sebagai kendaraan politik, presiden Soeharto juga mengambil langkah untuk merubah tata tertib (tatib), yang menetapkan DPR dan MPR sebagai institusi politik yang sepenuhnya berada dibawah pengawasannya, yang akhirnya melahirkan beberapa hak-hak khusus bagi presiden Soeharto sebagai kepala negara. Diantara hak-hak tersebut ialah, menunjuk seperlima anggota DPR dan tiga perlima anggota MPR, yang mana ketetapan tatib ini tentunya sangat merugikan dan membatasi terhadap peran politik PDI dan PPP sebagai oposisi Golkar. Sehingga dapat menjamin keberlanjutan dominasi pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan pandangan mayoritas publik.

Selain itu, Golkar juga melakukan restrukturisasi yang akhirnya membentuk tujuh kelompok induk yang tujuannya ialah untuk mewedahi para intelektual dan politisi Orde Baru. Yang kemudian melalui salah satu dari tujuh kelompok induk tersebut, yaitu yang bernama "Karya Pembangunan" Golkar mewedahi kaum intelektual dan politisi non partai yang diberi tugas untuk mengawal fraksi Karya Pembangunan di DPR ke arah yang mendukung terhadap program pembangunan pemerintahan Orde Baru.³⁶

Tidak sampai disitu saja, Golkar juga semakin memperkuat hegemoninya, melalui Menteri Dalam Negeri yang pada tanggal 11 Februari 1970 mengeluarkan peraturan menteri No.12/1969 dan PP No.6 tahun 1970, yang berisikan larangan pegawai negeri menjadi anggota parpol dan hanya boleh memberikan dukungannya pada Golkar, serta jika ingin terlibat dalam Golkar atau parpol lain harus mendapat izin khusus dari pemimpinnya.³⁷

Setelah itu secara terus menerus pemerintahan Orde Baru membangun perkembangan dalam bidang ekonomi yang salah satunya ialah dengan membentuk tim ekonomi yang bertujuan untuk membangun hubungan dengan negara-negara barat dan menarik negara-negara tersebut untuk mau berinvestasi. Memang benar kemajuan dan keberkembangan ekonomi dapat dirasakan, namun hal tersebut tidak merata, melainkan lebih terdominasi di kota Jakarta dan Jawa, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dan terjadinya konflik di daerah selain Jakarta dan Jawa. Kamajuan ekonomi tersebut juga lebih banyak memberikan keuntungan terhadap pihak-pihak yang memiliki modal saja, sehingga yang kaya semakin kaya dan juga sebaliknya, dan menimbulkan jarak atau sentimenisasi antara si miskin dan si kaya. Pemerintahan Orde Baru juga terus menerus memperkuat pemerintahan pusat yang salah satunya ialah dengan cara membangun sentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengakibatkan semakin kuat dan dominannya kontrol politik pusat terhadap daerah. Yang mana tidak jarang kebanyakan ketetapan-ketetapan pemerintah Orde Baru dilaksanakan dengan cara paksa, dikarenakan sangat kuatnya pemerintah pusat.³⁸

Sering kali Soeharto dalam pidatonya, meng-*koar-koar*-kan tentang program pemerintahan Orde Baru yang semakin memperkuat bidang ekonomi dan pemerintahan pusat. Karena di mata

³⁵*Ibid*, 3.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, 4.

³⁸*Ibid*, 4-5

M. Ubaidillah Hunaini

Orde Baru, pemerintahan yang ideal ialah pemerintahan yang kuat dan maju dalam bidang ekonomi, karena hal itu akan sangat mendukung terhadap berberlanjutan kekuasaan pemerintahan tersebut. Dalam menyampaikan program-program propagandanya, pemerintah Orde Baru memanfaatkan berbagai macam media masa baik media cetak maupun elektronik, yang mana hal ini tidak bisa ditolak oleh para pihak media masa tersebut.³⁹

Pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintahan berjalan dengan cara otoriter. Semua rakyat harus tunduk dan patuh pada pemerintahan dan tidak boleh ada pemberitaan negatif dan menjatuhkan sedikit pun tentang pemerintahan. Bahkan, pada kala itu pers sangat dibatasi. Tidak ada yang boleh mengkritik kinerja pemerintah, karena semua program telah diatur berdasarkan keputusan pemerintahan. Hanya Soeharto yang boleh mengatur segala sesuatu di pemerintahan kala itu. Sangat berbeda jauh dengan pemerintahan saat ini yang demokratis dan memperbolehkan siapapun untuk menyampaikan pendapat dan suaranya.⁴⁰

Pemerintahan Orde Baru dengan kekuatan kekuasaannya yang selalu melibatkan ABRI sebagai pengawal pelaksanaan setiap program-programnya, dinilai sangat kejam dan penuh akan paksaan. Diceritakan, pada peristiwa Tanjung Priok (1984-1987), Soeharto menggunakan peran penting dari KOPKAMTIB (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) untuk mendukung dan melindungi kebijakan politiknya. Selaku panglima tertinggi, Soeharto bersikap represif (peksaan) untuk menghadapi respon masyarakat yang mungkin kurang setuju dengan kebijakan Asas Tunggal Pancasila yang dikeluarkan Orde Baru. Bahkan, dalam menghadapi masalah ini, sering kali Soeharto membuat pernyataan dan kebijakan yang memperbolehkan adanya kekerasan dalam menghadapi respon masyarakat terhadap kebijakan penguasa pada saat itu. Salah satunya ialah ketika rapat pimpinan (RAPIM) ABRI di Riau, 27 Maret 1980, sebagai presiden dan penanggung jawab seluruh kegiatan KOPKAMTIB, menyebutkan bahwa ABRI wajib untuk mengambil tindakan represif (paksaan) untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai golongan ekstrem yang harus dicegah dan ditumpas sebagaimana penanganan G 30 S.⁴¹

Tidak jauh dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), orang-orang kaum *Nahdhiyyin* juga ikut merasakan dampak dari propaganda pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu kaum Nahdhiyyin selalu mendapat tekanan dari pemerintah, sehingga NU tidak dapat melaksanakan agenda-agendanya secara maksimal, bahkan untuk masuk dalam sektor pemerintahan dan birokrasi pun sangat sulit. Hal ini dikarenakan setiap pergerakan NU selalu diawasi oleh bayang-bayang pemerintahan Orde Baru. Sampai-sampai Gus Mus mengatakan bahwa pada era tersebut NU selalu dizalimi, ditindas dan mendapat kecaman dari berbagai pihak.⁴² Sebagaimana telah diceritakan diatas, Soeharto dalam Orde Barunya selalu membuat berbagai macam Propaganda yang tidak menguntungkan dan sangat membatasi terhadap parpol yang menjadi oposisi Golkar. Seperti adanya hak Soeharto untuk menunjuk sendiri seperlima anggota DPR dan tiga perlima Anggota MPR. Yang mana hal itu tentunya hanya berpihak dan menguntungkan terhadap Golkar saja, dan merugikan bahkan sangat

³⁹*Ibid.*

⁴⁰ Annisa Medina, *Orde Baru Masa Kelam Indonesia*, PJ Kolom, 2, 10/5/20, 10.48 WIB.

⁴¹*Ibid.*, 3.

⁴² Bagus Ainun Najib Muhammad, 'Nahdhatul Ulama' vs Ideologi Islam Transnasional, dalam *Kompasiana*, (7 Mei 2020).

M. Ubaidillah Hunaini

membatasi terhadap PDI dan PPP. Sedangkan hampir keseluruhan dari orang-orang kaum *Nahdhiyyin* berkumpul jadi satu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sehingga orang-orang kaum nahdhiyin kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintahan.

Kembali pada keputusan kiai Must'in untuk berafiliasi dalam partai Golkar ini, pastinya bukan tindakan yang tidak memiliki alasan dan latar belakang yang kuat. Dikarenakan, kiai Musta'in ialah salah satu kiai yang masih dalam kalangan Nahdhatul 'Ulama, pengasuh pondok pesantren Rejoso, seorang mursyid tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah*, meneruskan ayahnya, KH. Romly Tamim, dan bahkan masih keluarga dari pendiri Nahdhatul Ulama'. Yang mana dipandangan orang-orang kaum *Nahdhiyyin* dan para kiai-kiai NU, idealnya, seharusnya kiai Musta'in masuk dan berafiliasi dalam Partai PersatuanPembangunan (PPP). Maka tidak heran jika terdapat banyak orang dari kalangan *Nahdhiyyin* dan bahkan para kiainya, tidak bisa menerima, menentang dan bahkan mencemooh terhadap tindakan yang telah diambil oleh kiai Musta'in.

Keputusan kiai Musta'in untuk bergabung dalam partai Golkar ialah karena ia melihat kondisi politik pada masa itu (Orde Baru), yang mana pada masa itu pemerintahan Orde Baru berdiri dengan sangat kuat dengan berbagai macam propagandanya, yang mana hal itu mengganggu dan menghalangi terhadap pergerakan dan agenda-agenda orang-orang NU. Pamerintah Orde Baru selalu menekan dan mengawasi terhadap setiap pergerakan NU. Sehingga NU tidak bisa leluasa untuk bergerak dan selalu berada dibawah bayang-bayang pengawasan pemerintahan Orde Baru.⁴³ Selain melalui cara tersebut, Soeharto juga menghalangi jalan politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga sekaligus Partai Demokrasi Indonsesia (PDI), yang mana (PPP) ini merupakan ujung tombak yang seharusnya bisa digunakan oleh orang-orang kaum *Nahdhiyyin* dalam kiprah politik kenegaraan, yang nantinya befungsi sebagai penyampai inspirasi rakyat kalangan NU terhadap pemerintahan negara. Namun, dengan propagandanya, Soeharto mempersempit jalan dari PPP dan PDI untuk bersaing politik dan memasukkan wakil dari kedua partai tersebut untuk mengisi kursi-kursi di parlemen pemerintahan. Yang salah satunya ialah dengan merubah tata tertib (tatib) yang akhirnya melahirkan hak-hak pribadi Soeharto sebagai seorang presiden. Diantara hak-hak Soeharto ialah, DPR dan MPR sebagai lembaga politik tertinggi negara secara penuh berada dibawah pengawasan Soeharto, dan dia juga memiliki hak untuk menunjuk seperlima anggota MPR dan tiga perlimala anggota MPR.⁴⁴

Sudah dapat dipastikan hal itu hanya berpihak dan menguntungkan terhadap partai Golkar dan menjamin keberlanjutan pemerintahan Orde Baru. Yang akibatnya kebanyakan keputusan pemerintah hanya atas dasar aspirasi dari orang-orang golkar saja, dan hanya menguntungkan pada orang-orang tersebut dan merugikan terhadap kalangan selain Golkar. Hal ini dikarenakan sangat minimnya anggota parlemen negara yang merupakan orang-orang perwakilan dari selain Golkar (PPP, PDI).

Berangkat dari latar belakang inilah kiai Musta'in mengambil keputusan untuk masuk dan bergabung dalam partai Golkar yang bertujuan untuk menyampaikan kepentingan atau aspirasi umat

⁴³ Bagus Ainun Najib Muhammad, *Nahdhatul Ulama' vs Ideologi Islam Transnasional*.

⁴⁴ Wahyono Hadi Dwi dan Gayung kusuma, *Propaganda Orde Baru 1966-1980*, 2.

M. Ubaidillah Hunaini

kalangan *Nahdīyīn*, walaupun tidak secara terang-terangan.⁴⁵ Kiai Musta'in berkata bahwa ia tidak rela jika negara ini hanya dikuasai orang-orang Islam abangan. Karena hal tersebut akan menggiring terciptanya ketetapan-ketetapan pemerintah yang kurang menguntungkan, khususnya bagi kalangan *Nahdīyīn*. Selain itu, jika melihat sejarah kemerdekaan Indonesia, sangat banyak peran serta, perjuangan dan pengorbanan para ulama NU, sampai akhirnya Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Sehingga, sangat tidak patut jika para ulama NU dilupakan dan tidak diberi peran dalam melanjutkan pembangunan negara yang telah susah payah diraih kemerdekaannya ini. Lebih-lebih jika sampai negara ini digiring pada arah yang merugikan orang-orang kalangan NU.⁴⁶ Hal ini juga yang menjadi alasan kiai Musta'in mendirikan Universitas Darul Ulum (UNDAR), dengan motonya "mencetak generasi yang berotak london dan berhati masjidil haram" sebagaimana telah diceritakan diatas, yang bertujuan untuk mencetak generasi penerus yang akan menjadi pemimpin di masa depan.

Kiai Musta'in memandang dan mengibaratkan Golkar yang ketika itu memiliki kekuasaan politik terkuat, sebagai kapal besar yang mana ketika kapal kecil yang dibawanya di-*nunut*-kan pada kapal besar tersebut akan bisa berjalan lebih kuat, dan ketika sudah sampai pada tujuannya, kapal kecil yang dibawanya tersebut akan kembali memisahkan diri dari kapal besar tersebut dan kembali pada jalan dan tujuannya sendiri. Sehingga kiai Musta'in memutuskan untuk bergabung pada partai berlambang pohon beringin tersebut. Melalui keanggotaannya dalam Golkar tersebut, kiai Musta'in yakin bahwa ia akan bisa lebih mudah dalam perjuangannya untuk membela bangsa, agama dan negara. Kiai Musta'in mengatakan partai itu ibarat baju yang bisa bergantai-ganti sesuai selera dan tujuannya masing-masing.

Pada masa itu pula, partai politik yang sah hanyalah Golkar, PDI dan PPP. Yang daiantara masing-masing simpatisannya terdapat antipati dan fanatisme yang keras dan sensitif. Hanya karena perbedaan afiliasi parpol, tumbuhlah antipati yang keras dan ekstrim. Orang-orang muslim tradisional kala itu, khususnya kalangan *Nahdīyīn*, pada umumnya menyalurkan aspirasi politiknya pada PPP yang mana partai tersebut bercorak dan berorientasi Islam. Bahkan, saking kuatnya fanatisme pada kala itu, keluar dari PPP dan bergabung pada partai yang lain dianggap telah melakukan kemurtadan parpol. Partai politik memiliki kedudukan yang hampir mirip dengan agama pada kala itu.⁴⁷ diceritakan bahwa di masa itu, sekitar tahun 70-an, saking parahnya fanatisme terhadap partai politik, sampai-sampai ketika ada orang PPP yang berpindah ke partai Golkar dianggap seperti orang yang kafir.⁴⁸

Kiai Musta'in, dengan langkahnya bergabung pada partai Golkar juga ikut merasakan akibat dari fanatisme tersebut. Tidak jarang ia mendapatkan cemoohan dan hinaan dari berbagai kalangan, bahkan dari para kiai. Bahkan, diceritakan, suatu ketika kiai Musta'in sedang melakukan perjalanan dengan sopirnya melintas di daerah Jombang selatan di area basis PPP, tiba-tiba saja segerombolan

⁴⁵ Afif Fahri Reza (ialah salah seorang alumni pondok pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang), *Wawancara*, Blitar, (25 April 2020).

⁴⁶ Dr. H. Muhtadi, *Wawancara*, Jombang, (20 April 2020).

⁴⁷ Binhad Nurraohmat, Kiai Musta'in Romly, Serumah Dua Partai, dalam *Alifid*, (09 Mei 2018), diambil pada 7 Mei 2020.

⁴⁸ Ust Nasiruddin S,Pd, M,M (salah satu pengajar di pondok pesantren al-Fithrah Surabaya, yang dulunya merupakan santri Darul Ulum Jombang), *wawancara*, Surabaya, (22 Februari 2020).

M. Ubaidillah Hunaini

orang dari kalangan santri menghadang mobilnya sampai terperosok ke dalam selokan. Kiai Musta'in memandang hal itu merupakan dampak dari pengkultusan dan fanatisme partai politik yang terjadi pada masa itu.⁴⁹

Adanya fanatisme parpol dan sampai-sampai dikultuskan hampir menyamai kedudukan agama, sebagaimana diceritakan di atas, merupakan salah satu latar belakang yang mendorong kiai Musta'in untuk masuk partai Golkar. Kiai Musta'in ingin merubah mindset orang-orang, khususnya orang-orang muslim kalangan NU pada kala itu yang menurutnya sudah salah dan melampaui batas. Dikarenakan, kiai Musta'in menganggap partai politik bukanlah sebagai agama, sehingga beralih dari satu parpol ke parpol yang lain bukanlah merupakan suatu kemurtadan. Sebagaimana telah dijelaskan, kiai Musta'in menganggap parpol ibarat pakaian yang bisa berganti-ganti kapan saja sesuai dengan selera dan tujuan masing-masing.⁵⁰

Diceritakan oleh kiai Asrori al-Ishaqi⁵¹, bahwa sebelum memutuskan untuk masuk pada partai Golkar, kiai Musta'in juga berkunjung pada kiai Muhammaad Utsman al-Ishaqi⁵² untuk meminta pendapat tentang langkah yang akan ditempuhnya tersebut. Kemudian kiai Utsman mengiyakan dan merestunya. Diceritakan juga, bahwa kiai Musta'in memiliki kelebihan bisa membaca kondisi dan masa depan politik pada masa itu, ia mengetahui bahwa kondisi politik pada masa itu akan sangat membahayakan pada kalangan NU, sehingga ia memutuskan untuk mengambil langkahnya tersebut. Namun banyak orang-orang *Nahdīyīn* dan para kiainya yang tidak bisa membaca apa sebenarnya maksud dan tujuan dari jalan yang diambil kiai Musta'in tersebut, sehingga banyak tentangan dan hinaan yang diterima oleh kiai Musta'in.⁵³

Kontribusi Afiliasi KH. Musta'in Romly dalam Partai Golkar

Ada banyak kontribusi yang dihasilkan kiai Musta'in saat ia menerjuni dunia politik, terutama di saat bergabung dengan partai Golkar. Hal itu dapat diperlihatkan sebagai berikut:

1. Kembali Pada Umat Islam, Khususnya Warga NU

Hilangnya fanatisme parpol dari kalangan warga NU. Untuk mendobrak adanya mindset orang-orang NU yang dianggapnya kurang benar tersebut, kiai Musta'in melakukan tindakan yang kontroversial dengan bergabung dalam partai Golkar. Memang benar, sesuai dengan prediksinya, setelah ia bergabung di partai Golkar pasti akan menemukan banyak tantangan dan hinaan dari beberapa kalangan, terlebih dari kalangan NU sendiri. Namun dengan niatnya yang kuat, disertai dengan adanya restu dari para sesepuh yang dimintai izin dan restu, termasuk ayahnya sendiri, KH. Romly tamim melalui jalan *Ruḥānīyah*. Dan setelah menghadapi berbagai macam tantangan, akhirnya perjuangan kiai Musta'in membuahkan hasil.

⁴⁹ Binhad Nurraohmat, *Kiai Musta'in Romly, Serumah Dua Partai*,

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Mursyid tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah al-Utsmaniyyah* yang ada di Surabaya dan pengasuh pondok pesantren al-Fithrah Surabaya.

⁵² Kiai Utsman (ayah kiai Asrosi) ialah murid kiai Romli (ayah kiai Musta'in) yang menjadi Mursyid tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* di Surabaya, sebelum akhirnya diteruskan oleh kiai Asrori setelah ia wafat. Ketika kiai Romli Tamim wafat, kiai Musta'in menyempurnakan kemursyidan kepada Kiai Utsman, dikarenakan *laḥīqah* kemursyidannya belum sempurna.

⁵³ Ust Wahdi Alawi, *wawancara*, Surabaya, (22 Februari 2020).

M. Ubaidillah Hunaini

Setelah orang-orang, khususnya kalangan NU memahami apa tujuan kiai Musta'in dan merasakan manfaat dari tindakan yang dilakukannya, akhirnya mereka sadar dan tidak lagi memusuhi kiai Musta'in dan sedikit demi sedikit terkikis adanya *mindset* kefanatikan parpol di kalangan warga NU, hingga akhirnya pada muktamar NU ke-27 yang diselenggarakan di Situbondo, ditetapkan, bahwa NU, sebagai organisasi keagamaan, telah kembali pada *kebittab-nya*, yaitu *kebittab* 1926 dan menarik NU dari keterlibatan terhadap politik praktis dan kembali fokus pada cita-cita awalnya yang murni sebagai organisasi keagamaan yang menjunjung tinggi pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal atau landasan dasar organisasi tersebut. Sejak saat itu lah, setiap warga NU bebas memilih partai politik sebagai penyalur aspirasinya sesuai dengan kehendak masing-masing.⁵⁴

Pemerintah Menjadi Perhatian Pada Beberapa Pondok Pesantren. Bukan hanya pondok pesantren Darul Ulum saja yang merasakan manfaat dari tindakan kontroversial yang ditempuh kiai Musta'in. Namun juga beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Bahkan, Soeharto pernah berjukunjung ke beberapa pondok seperti Tambak Beras, Den Anyardan Tebu Ireng. Bukan hanya berkunjung, Soeharto juga memberikan sumbangan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pondok-pondok tersebut.⁵⁵

Kegiatan Warga NU Bisa Berjalan Lancar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III, dengan kondisi politik pada kala itu, yang mana pemerintahan Orde Baru selalu mengawasi setiap gerakan NU, sehingga NU tidak bisa dengan leluasa melaksanakan setiap agenda-agendanya, karena selalu berada dibawah bayang-bayang pengawasan pemerintah orde baru, yang mana dikatakan pemerintah Orde Baru kurang memiliki simpatik terhadap kalangan muslim, namun setelah setelah kiai Musta'in berafiliasi pada partai Golkar dan berhasil menjalin kedekatan dengan pemerintah Orde Baru, NU bisa lebih leluasa melaksanakan setiap agenda-agendanya.⁵⁶

Gerakan penyelamat para Kiai. Diceritakan, dengan secara tidak terang-terangan, kiai Musta'in membuat gerakan untuk menyelamatkan para kiai. Dikarenakan, pada masa itu, sebagaimana telah diceritakan pada bab III, pemerintahan Suharto merupakan pemerintahan yang sangat kuat dan keras, bahkan kejam. Soeharto tidak segan menindak dengan tindakan kejam kepada setiap orang yang tidak patuh dengan setiap kebijakannya. Dengan menyinergikan setiap pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat dan dengan mengadakan pengawasan ketat, Soeharto bisa dengan mudah untuk memata-matai setiap tokoh yang ada di daerah. Soeharto selalu memasukkan ABRI dalam setiap Daerah, bahkan sampai desa. Yang bertujuan untuk memata-matai ketika ada orang yang tidak patuh dan menolak ketetapan pemerintah, terlebih para tokoh dan kiai, yang biasanya memiliki keberanian yang lebih untuk menentang ketika ada hal-hal yang menurutnya atau menurut agama kurang benar. Diceritakan, sering kali ketika ada beberapa tokoh, seperti para kiai atau tokoh yang dalam suatu ceramah, pidato atau semacamnya, menyindir atau mengkritik dan tidak setuju atau tidak

⁵⁴ S Pranoto, *Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo*, Udigibling.uinsby, 2013, 31-3.

⁵⁵ Dr. H. Muhtadi (salah satu dosen UNDAR, yang dulunya merupakan santri kiai Musta'in dan juga saksi hidup kiai Musta'in), Wawancara, Jombang, 20/4/2020, 18.30 WIB.

⁵⁶*Ibid.*

M. Ubaidillah Hunaini

mendukung terhadap ketetapan pemerintahan Orde Baru, orang itu akan hilang dan menjadi tawanan pemerintah, bahkan ada juga yang menghilang dengan tanpa jejak dan tidak diketahui entah masih atau tidak.

Kiai Musta'in membuat gerakan penyelamat kiai ini dengan cara mengajak sebagian tokoh Islam atau kiai yang ada di daerah-daerah, terlebih yang merupakan alumni pondok Darul Ulum atau UNDAR untuk bergabung dalam partai Golkar. Namun terdapat konsekuensi besar ketika mengikuti jalan yang ditempuh kiai Musta'in, seringkali setiap kiai yang ikut kiai Musta'in untuk masuk Golkar akan ditinggalkan oleh santri-santrinya, dikarenakan dampak mewabahnya kefanatikan parpol pada masa itu dan orang sekitarnya akan berpandangan jelek. Namun dengan adanya Pemerintahan Orde Baru yang selalu memberikan fasilitas dan kekuasaan pada setiap anggota pemerintahannya, salah satu kiai yang masuk menjadi anggota Golkar tadi bisa menyelamatkan kiai lain yang menjadi tawanan aparat pemerintahan.⁵⁷

Salah satu contohnya ialah kiai Muafiq (Sampang, Madura) dan kiai Alwi bin Abdullah (Bangkalan Madura) yang merupakan paman dari ust Wahdi (salah satu narasumber). Kedua kiai ini mengikuti perintah dari kiai Musta'in dan menerima konsekuensi sebagaimana di atas tadi, namun juga memberikan manfaat sebagaimana tujuan kiai Musta'in, yang mungkin orang di sekelilingnya jarang yang tahu pada waktu itu.⁵⁸

Lalu yang terakhir, *Umat Nahdīyīn Bisa Lebih Mudah Menembus Jajaran Pemereintahan*. Merupakan kontribusi yang diperoleh dari langkah yang dijalani kiai Musta'in, dengan kedekatannya pada pemerintahan, bisa menjadi jalan bagi para politisi NU untuk menduduki kursi pemerintahan, yang mana hal itu pasti akan menguntungkan bagi warga *Nahdīyīn*. Bahkan, setelah orang-orang sadar dan faham dengan tujuan kiai Musta'in berafiliasi pada partai Golkar, banyak para kiai yang mengikuti jalannya dengan juga bergabung pada partai Golkar.⁵⁹

2. Kembali Pada Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Ulum Dan TQN Rejoso.

Historis Dan Perkembang-pesatnya Universitas Darul Ulum. Secara singkat, diceritakan bahwa, berdirinya Universitas ini ialah untuk menyiapkan para generasi penerus dari kalangan pesantren yang selain mumpuni dalam ilmu agama namun juga bisa menjadi pemimpin di masa depan untuk mengawal berkembang pemerintahan negara ini, demi melanjutkan perjuangan ulama' terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Salah satu hal yang menjadi misi dari langkah kiai Musta'in masuk pada partai nasionalis (Golkar) ialah untuk menjalin kedekatan dengan pemerintahan supaya UNDAR bisa berkembang dan maju. Sehingga, dengan kedekatan kiai Musta'in dengan pemerintah, akhirnya perguruan tinggi ini bisa maju dan berkembang.⁶⁰

Berdirinya Beberapa Lembaga Pendidikan Formal Di Darul Ulum. Bukan hanya UNDAR, dengan kedekatan kiai Musta'in dengan pemerintah, ia dapat mendirikan berbagai lembaga

⁵⁷ Ust Wahdi Alawi S, Ag, wawancara, Surabaya, 22 Februari 2020 M, 08.30.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Dr. H. Muhtadi (salah satu dosen UNDAR, yang dulunya merupakan santri kiai Musta'in dan juga saksi hidup kiai Musta'in), Wawancara, Jombang, 20/4/2020, 18.30 WIB.

⁶⁰ Dr. H. Muhtadi (salah satu dosen UNDAR, yang dulunya merupakan santri kiai Musta'in dan juga saksi hidup kiai Musta'in), Wawancara, Jombang, 20/4/2020, 18.30 WIB.

M. Ubaidillah Hunaini

pendidikan formal dari berbagai jenjang di pondok pesantren Darul Ulum sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III.

Kegiatan-Kegiatan Tarekat Berjalan Lancar Dan Aman. Dengan adanya sinergi yang terjalin dengan baik antara kiai Must'ın dengan pemerintah, bukan hanya warga NU yang meraih manfaat dengan dapat diselenggarakannya setiap kegiatan dengan lancar. Namun terlebih jama'ah tarekat kiai Musta'in, dapat melaksanakan setiap kegiatan ketarekatan dengan lancar. Bahkan, diceritakan bahwa di setiap kegiatan tarekat jama'ah kiai Musta'in, aparat pemerintah ikut membantu untuk mengamankan.⁶¹

Banyak Alumni UNDAAR Yang Menjadi Pejabat. Juga merupakan kontribusi dan manfaat dari gerakan kontroversial kiai Musta'in, sesuai dengan tujuannya mendirikan universitas Darul Ulum, ialah banyak dari alumni perguruan tinggi tersebut yang berhasil menjadi pejabat dan duduk di pemerintahan, mulai dari dulu hingga sekarang. Tentunya hal ini juga memberikan dampak positif bagi warga kalangan NU, khususnya bagi keluarga besar Darul Ulum.⁶²

Golkar ialah jalan pintas yang diambil kiai Musta'in untuk berjuang dalam membela bangsa, agama dan negara, juga. Ia memilih hal itu karena mengetahui melalui kendaraan partai Golkar ia akan bisa lebih lancar dan mudah dalam perjuangannya tanpa mengikuti kecurangan-kecurangan dan keburukan-keburukan yang ada didalamnya. Dikarenakan sebagaimana dicertiakan pada bab III, Soeharto dengan propaganda politiknya mempersulit dan mempersempit jalur politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Jadi ketika ia berjuang melalui PPP jalannya akan lebih sulit dan berat.

Penutup

Alasan yang mendorong kiai Musta'in untuk bergabung dan berafiliasi pada partai Golkar, ialah karena kondisi pemerintahan Orde Baru yang dirasa kurang menguntungkan, bahkan membahayakan orang-orang Islam, khususnya umat kalangan Nahdhiyin. Mereka tidak bisa menyentuh parlemen pemerintahan dan menyalurkan aspirasi umat kepada pemerintah, yang dikarenakan berbagai macam propaganda politik Soeharto. Juga disebabkan karena maraknya fanatisme parpol di kalangan warga NU.

Sesuai dengan tujuan awalnya, tindakan kiai Musta'in bergabung dalam partai Golkar membuahkan banyak manfaat yang kembali pada kaum Muslim, khususnya pada kalangan NU, pondok Darul Ulum dan kaum tarekat yang dipimpinya. Orang-orang yang dulunya tidak sepatutnya dan menentang tindakan kiai Musta'in, setelah merasakan manfaat dari tindakan tersebut, menjadi sadar dan meminta maaf padanya.

Daftar Pustaka

Al-Qusyairi, *al-Risālah al-Qusyairiyah*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2011.

Al-Fasi, Ahmad Zaruq, *Qawā'id al-Taṣawwuf*, Surabaya: STAI Al-Fihrah, 2017.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

M. Ubaidillah Hunaini

Al-Sarroj, Abu Nashr, *Al-Luma' fī al-Taṣawwuf*

Asrori, Ahmad, *al-Muntakhabāt*, Surabaya: Alkhidmah, 2009.

Al-Tasyarruf bi Dzīkri Abli al-Taṣawwuf

Alawi, Wahdi, *wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2020 M

Abdul, Syakur, *Transformasi Gerakan Tarekat Syafawiyah dari Teologis ke Politik*, IAIN Raden Intan Lampung, 2014, vol.8.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Dwi, Wahyono Hadi dan Kusuma, Gayung, Propaganda Orde Baru 1966-1980, dalam www.journal.ac.id, 5 Mei 2020.

Fadli, Dzul dan Muh, Andi, *Sistem Politik Indonesia*, diambil dari books.google.co.id pada 13 Mei 2020.

Isa, Abdul Qadir, *Haqā'iq 'an al-Taṣawwuf*, Suriyah: Dar al-'irfan, 2007.

Indonesia Civics Education, *Pendidikan Kewarganegaraan*, diambil dari Books.google.co.id pada 13 Mei 2020.

Mu'min, Ma'mun, "PERGUMULAN TAREKAT DAN POLITIK (Perranan Kiai Haji Muhammad Shidiq dalam Terekat dan Politik di Kudus)", STIN Kudus, dalam media.neliti.com, 29 Februari 2020.

Muhtadi, *Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan Generasi Muda Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Universitas Darul 'Ulum (TQN UNNDAR) Jombang*, Surabaya: UINSA, 2019.

Muhtadi, *Wawancara*, Jombang, 20 April 2020.

Medina, Annisa, *Orde Baru Masa Kelam Indonesia*, PJ Kolom, 10/5/20, 10.48 WIB.

Muhammad, Bagus Ainun Najib, Nahdhatul Ulama' vs Ideologi Ilsam Transnasional, dalam *Kompasiana*, 7 Mei 2020.

Nashiruddin, *wawancara*, Surabaya, 21 Februari 2020 M.

Nurraohmat, Binhad, Kiai Musta'in Romly, Serumah Dua Partai, dalam *Alif.id*, diambil pada 7 Mei 2020.

Pranoto, S, *Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo*, Udigibling.uinsby, 2013.

Reza, Afif Fahri, *Wawancara*, Blitar, 25 April 2020.